

PEMBERDAYAAN NELAYAN WILAYAH PESISIR OLEH PEMERINTAH DESA BANJAR KEMUNING KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Uswatun Chasanah¹, Ananta Prathama^{2*}

^{1,2} Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: prathama.ananta@gmail.com

ABSTRACT

As a maritime country, Indonesia is highly dependent on marine resources for food, livelihoods and cultural values. Most people, especially those on the coast, choose a profession as a fisherman for their livelihood. However, the welfare of fishermen has not received maximum attention from the government, one of which is the fishermen in Banjar Kemuning Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. This study aims to determine the empowerment of fishermen in coastal areas by the Banjar Kemuning Village Government, Sedati District, Sidoarjo Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation. The focus of research in this study uses 4 (four) of 6 (six) concepts according to Mardikanto's theory (2014). The results showed that: 1) Institutional improvements carried out by the Banjar Kemuning Village Government were rebuilding KUB, developing business partnership networks, and being a liaison between fishermen and the agency to obtain capital assistance. 2) Improvements of business carried out by the Banjar Kemuning Village Government, namely forming a new business unit in KUB, namely Vannamei shrimp cultivation, but in this activity the participation of fishermen is still lacking. 3) The improvement in income is only limited to become a mediator for get assistance and capital loans. 4) Environmental improvement carried out is establishing a "Healthy Village House", but it has not been maximized in improving the physical environment because disposal of waste shells and shellfish stripping sites have not been properly and adequately repaired.

Keywords: Empowerment; Fishermen; Village Government

ABSTRAK

Kondisi sebagai negara maritim menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya laut untuk makanan, mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di pesisir memilih profesi sebagai nelayan untuk mata pencaharian. Namun, kesejahteraan nelayan kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah salah satunya para nelayan yang ada di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan nelayan wilayah pesisir oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) konsep menurut teori Mardikanto (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbaikan kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Desa Banjar Kemuning yaitu membangun kembali KUB, mengembangkan jejaring kemitraan usaha, dan menjadi penghubung antara nelayan dan dinas untuk mendapatkan bantuan modal. 2) Perbaikan usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Banjar Kemuning yakni membentuk unit usaha baru di KUB yaitu “Budidaya Udang Vannamei”, akan tetapi dalam kegiatan ini

partisipasi nelayan masih kurang. 3) Perbaikan pendapatan yang dilakukan yaitu hanya sebatas membantu untuk menjadi jembatan agar nelayan mendapat bantuan dan pinjaman modal. 4) Perbaikan Lingkungan yang dilakukan yaitu membentuk “Rumah Desa Sehat, namun belum maksimal dalam perbaikan lingkungan fisik karena pembuangan limbah kulit kerang dan tempat pengupasan kerang belum diperbaiki secara layak dan memadai.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Nelayan; Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim yang diakibatkan oleh luasnya wilayah perairan dibandingkan daratan. Dari total wilayah Indonesia yaitu sekitar 7.81 juta km², seluas 3.25 km² adalah lautan dan 2.55 juta km² yaitu Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya selebar 200 mil dari batas daratan yang ada di Indonesia. Sedangkan daratan hanya sekitar 2.01 juta km², yang bisa dikatakan 62% wilayah di Indonesia adalah perairan (Kompas.com 2022). Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilansir (JawaPos.com 2020) menyebutkan kekayaan laut mencapai Rp 1.772 triliun dengan potensi perikanan sebesar Rp 312 triliun, bioteknologi Rp 400 triliun, lamun Rp 4 triliun, mangrove Rp 21 triliun, wilayah pesisir Rp 560 triliun, wisata bahari Rp 20 triliun, transportasi laut Rp 200 triliun, dan minyak bumi Rp 210 triliun.

Kondisi sebagai negara maritim menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya laut untuk makanan, mata pencaharian, dan nilai-nilai budaya. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di pesisir memilih profesi sebagai nelayan untuk

mata pencaharian. Masyarakat pesisir menjadi ujung tombak sektor kelautan dan perikanan, dengan sekitar 80% tangkapan makanan laut diproduksi oleh sektor perikanan skala kecil (WRI-Indonesia.org 2020). Meskipun begitu, jumlah nelayan, baik nelayan laut, nelayan perairan umum darat, dan pembudidaya di Indonesia kian menurun. Menurunnya jumlah nelayan di Indonesia disebabkan kondisi rendahnya kesejahteraan yang dialami para nelayan, sehingga banyak masyarakat terutama generasi muda melabeli profesi masyarakat miskin dan tidak menjanjikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut (Chalid dan Yusuf 2014) mendefinisikan kesejahteraan yaitu ketika seseorang berada pada kondisi sejahtera yang dilihat dari fisik, mental, dan sosial. Jumlah nelayan miskin nasional mencapai 31,02 juta orang dari 7.87 juta didasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menegaskan realitas nelayan masih hidup dibawah garis kemiskinan (Wafi, Yonvitner, dan Yulianto 2019).

Minimnya sarana berupa perlengkapan tangkap ikan, memengaruhi tingkat

produktivitas yang menjadi terbatas, yang akhirnya berimbas pada kesejahteraan dan pendapatan nelayan (Supriharyono 2000; Triyanti dan Firdaus 2016). Faktor lainnya, yaitu kondisi fluktuasi alam, adanya armada tangkap nelayan asing canggih dalam menangkap ikan secara ilegal, dan belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada daya saing para nelayan, serta minimnya peranan lembaga ekonomi atau lembaga perkumpulan nelayan dalam menaungi kepentingan nelayan (Anwar, Zakariya, dan Wahyuni 2019).

Berdasarkan data dari kementerian kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebanyak 157.012 nelayan dan meningkat di tahun 2019 menjadi 237.966 nelayan. Dengan demikian, secara kumulatif dari tahun 2018-2019 maka Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah di Pulau Jawa dengan jumlah nelayan paling banyak dengan total 394.978 nelayan, namun jumlah nelayan di Jawa Timur memiliki kondisi yang memprihatinkan, yaitu kesejahteraan yang rendah dan hidup dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut sebagaimana pada berita (Surabaya. Bisnis.com 2021), yakni berdasarkan Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP) Jawa Timur mengungkapkan kinerja sektor perikanan tangkap merosot turun hingga 70% saat pandemi covid-19.

Salah satu desa nelayan di Provinsi Jawa Timur yang menarik perhatian peneliti yaitu Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati. Desa yang terletak di pesisir timur pulau Jawa ini sangat berpotensi akan hasil laut dan juga tambak yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari masyarakatnya. Desa Banjar Kemuning memiliki luas tanah 384.639 Ha dengan kondisi geografis yang cukup dekat dengan laut, yaitu kurang lebih 5 km. Menurut (Anggraeni, Wartoyo, dan Prasetyo 2018) Desa Banjar Kemuning sebagai wilayah masyarakat pesisir yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa Banjar Kemuning, pada tahun 2017, Ketua Paguyuban Kelompok Nelayan Desa Banjar Kemuning Baharudin menyampaikan keberadaan sekitar 125 kapal nelayan yang meliputi 180 nelayan ditambah Anak Buah Kapal (ABK). Mereka terbagi dalam beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu Sari Laut, Samudra Jaya, Maju Sejahtera, Lautan Abadi, dan Abata.

Para nelayan yang tergabung dalam KUB ini masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari penanganan kerang pasca penangkapan yang berakibat

pada rendahnya mutu, hingga kurangnya informasi tentang sistem sanitasi kekerangan dan diversifikasi produk olahan kerang (Saputra dan Siswantara 2020) Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat Desa Banjar Kemuning, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak berjalan dengan baik akibat masyarakat yang kurang produktif dalam melaksanakan usaha. Padahal terdapat potensi kerang yang berlimpah dapat dimanfaatkan menjadi suatu bahan produk UMKM yang penjualannya dapat diakses melalui internet (Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 2021).

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan di Kabupaten Sidoarjo bahwa pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha perikanan dilakukan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi nelayan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan nelayan. Menurut (Siagian 2016) pemerintah memiliki peran secara umum dalam berbagai bentuk mulai dari fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan,

pelayanan, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta pengaturan. Sedangkan menurut (Ndraha 2003) bahwa peran pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah dalam pencapaian tujuan.

Beberapa permasalahan yang terjadi belum dapat tertangani oleh pemerintahan daerah setempat, namun tertangani melalui keikutsertaan para akademisi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Surabaya. Para akademisi memberikan pelatihan, pembekalan, dan penyuluhan menghilangkan kandungan timbal pada kerrang melalui mekanisme depurasi (mengontrol pemeliharaan kerang dalam kondisi tertentu guna meminimalisir kontaminan mikroorganisme dalam minimal waktu 44 jam). Juga terdapat kegiatan penyuluhan, penggunaan, dan perawatan alat ukur kualitas air tambak dalam meningkatkan produksi bandeng oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Indriawati et al. 2020) Juga terdapat inovasi produk berupa abon kerang siap konsumsi yang telah melewati proses pengemasan dengan menggunakan vacuum, disertai desain yang menarik untuk dipasarkan secara daring (Fakultas Perikanan dan

Kelautan Universitas Airlangga 2021; NU Online 2018).

Apabila melihat beberapa uraian fenomena terkait nelayan di atas, yang perlu menjadi perhatian ialah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam hal memberikan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan. Peran-peran tersebut lebih ditonjolkan oleh stakeholder lain seperti Kaporlesta Sidoarjo, ITS Surabaya, Universitas Airlangga melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Bukan dari Pemerintah Desa Banjar Kemuning yang seharusnya sebagai aktor utama dalam memberikan dorongan kepada masyarakat.

Mengacu pada penelitian terdahulu di atas, maka dalam hal ini penelitian memfokuskan terkait pemberdayaan nelayan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, maka ditetapkan judul dalam penelitian ini oleh penulis ialah "Pemberdayaan Nelayan Wilayah Pesisir Oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena empiris yaitu tentang peran pemerintah Desa Banjar Kemuning dalam

penanganan masalah pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini yaitu berfokus untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan nelayan wilayah pesisir oleh pemerintah Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan empat konsep yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, dan perbaikan lingkungan, teori menurut (Totok Mardikanto 2014).

Menurut (Lantaeda, Lengkong, dan Ruru 2017) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berasal dari informan yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Desa Banjar Kemuning, Kaur TU, Sekretaris KUB Abata, dan nelayan Desa Banjar Kemuning. Penelitian ini didukung dengan sumber data tambahan seperti dokumen-dokumen dan observasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi tidak berstruktur, wawancara terbuka, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan yaitu menurut Miles dan Huberman dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dalam perbaikan kelembagaan dapat ditandai dengan terjadinya perbaikan atau melakukan perubahan pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki internal kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Diawali dengan tidak beroperasinya KUB membuat masyarakat nelayan tidak memiliki wadah pertemuan untuk berbagi dan memecahkan masalah, wadah kerja sama untuk mempermudah akses modal. Pada saat ini di Desa Banjar Kemuning terdapat 5 (lima) KUB yaitu Sari Laut, Samudera Jaya, Maju Sejahtera, Lautan Abadi, dan Abata. Setiap masing-masing KUB beranggotakan 30-40 nelayan, dan setiap nelayan hanya boleh bergabung dengan satu KUB saja.

Pemerintah Desa Banjar Kemuning yang kemudian melakukan upaya perbaikan kelembagaan internal organisasi dengan membangun KUB, menjalankan komunikasi dengan KUB seperti evaluasi setiap bulan, serta pemerintah desa juga menjadi jembatan antara KUB dengan dinas agar mendapatkan bantuan modal. Selain dengan dinas, Pemerintah Desa Banjar Kemuning juga menjalin mitra dengan bank maupun koperasi. Dengan adanya bantuan modal ini pemerintah desa berharap dapat memperbaiki internal kelembagaan KUB yang ada di Desa Banjar Kemuning. Untuk saat ini perbaikan kelembagaan dan pengembangan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning telah berjalan dengan baik dan memiliki kemitraan yang dapat mengembangkan manfaat dari keberadaan KUB kepada nelayan.

Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Setelah perbaikan kelembagaan yang terus dilakukan, langkah selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan agar lebih berdaya upaya yaitu melakukan perbaikan usaha. Langkah awal Pemerintah Desa Banjar Kemuning untuk melakukan perbaikan usaha yaitu dengan menentukan unit usaha yang akan dijalankan. Unit usaha baru yakni “Budidaya Udang Vannamei”.

Pemilihan “Budidaya Udang Vannamei” dikarenakan selain dari harganya yang stabil dan tinggi, udang vannamei juga memiliki gizi yang tinggi untuk dikonsumsi, peminat dari udang ini sangatlah banyak mulai dari pasar, rumah tangga hingga pabrik pengolahan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Banjar Kemuning melakukan usaha menjadi penghubung antara nelayan dengan UPT Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Jawa Timur untuk Budidaya Udang Vannamei Skala Mini. Akan tetapi, keberadaan “Budidaya Udang Vannamei” belum menjadi usaha yang produktif dan mandiri, hal tersebut terlihat pada saat dilakukan sosialisasi maupun pelatihan, partisipasi nelayan masih minim. Hal ini disebabkan para nelayan yang waktunya lebih banyak dipergunakan untuk melaut, serta para nelayan yang kurang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah desa juga menjadi salah satu penyebabnya.

Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Dalam perbaikan pendapatan, para nelayan masih memiliki masalah terkait harga jual tangkapan laut. Para nelayan yang mempunyai hutang kepada pemilik modal untuk membeli sebuah perahu yang harganya mencapai 25-40 juta, yang mengharuskan nelayan menjual hasil tangkapan laut mereka dengan harga yang tidak sesuai dengan harga

pasar kepada pemilik modal. Begitulah cara nelayan untuk menyicil hutang mereka. Perbaikan pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning melalui KUB yaitu membentuk koperasi untuk simpan pinjam sehingga para nelayan akan semakin mudah mengajukan bantuan modal. Selain itu, Pemerintah Desa Banjar Kemuning juga berperan aktif untuk memfasilitasi antara dinas koperasi dengan nelayan agar mendapatkan bantuan bergilir sebesar 1 juta. Bantuan ini digunakan untuk kepentingan anggota nelayan yang biasanya dipergunakan untuk simpan pinjam.

Pemerintah Desa Banjar Kemuning juga menjadi penghubung nelayan dengan pihak swasta yang memberikan ilmu bagi nelayan untuk membuat produk UMKM sendiri. Produk UMKM yang diproduksi oleh nelayan di Desa Banjar Kemuning yakni kerang krispi, kerupuk kerang, dan sate kerang. Produk ini dijual di depan rumah atau pinggir jalan pada saat pagi hari. Selain produk UMKM, nelayan di Desa Banjar Kemuning juga mencoba menjual kulit kerang untuk bahan kosmetik. Walaupun penghasilan untuk menjual kulit kerang tidak seberapa akan tetapi penjualan kulit kerang ini dapat sedikit membantu pemasukan nelayan.

Pada indikator perbaikan pendapatan Pemerintah Desa Banjar Kemuning belum bisa melakukan perbaikan pendapatan nelayan karena keterbatasan alat untuk membuat produk UMKM dapat bertahan lama serta sebagian nelayan yang masih terlilit hutang kepada pemilik modal yang mengakibatkan penjualan hasil laut menjadi rendah.

Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Dengan adanya perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh fasilitas yang kurang layak dan memadai. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pemerintah Desa Banjar Kemuning, jumlah nelayan Desa Banjar Kemuning berdasarkan keadaan sosialnya selalu meningkat setiap tahunnya. Dibuktikan pada tahun 2019 sebanyak 175 nelayan, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 185 nelayan, dan meningkat kembali di tahun 2022 sebanyak 200 nelayan. Sehingga fasilitas fisik dapat dikatakan sangat penting bagi para nelayan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning untuk perbaikan lingkungan kesehatan yaitu mengelola lahan desa kosong yang menjadi

“Rumah Desa Sehat” dengan diadakan dua kegiatan di “Rumah Desa Sehat” yakni imunisasi pada balita dan cek kesehatan bagi lansia. Kegiatan ini dilaksanakan di malam hari dan tidak dipungut biaya. Lalu untuk perbaikan lingkungan sosial nelayan Desa Banjar Kemuning banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan “Rumah Desa Sehat” dan dalam kerukunan antar nelayan terjalin dengan baik serta tidak pernah ada konflik yang sampai membesar. Dari segi perbaikan lingkungan kesehatan dan sosial, Pemerintah Desa Banjar Kemuning telah melakukan pemberdayaan dengan baik.

Namun, dari segi perbaikan lingkungan fisik Pemerintah Desa Banjar Kemuning masih belum bisa melakukan perbaikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat tempat mengupas kerang yang didirikan oleh Pemerintah Desa Banjar Kemuning masih belum layak dikarenakan bangunan yang hanya beratapkan asbes dan tidak memiliki tembok, hanya menggunakan asbes di sisi kanan kirinya lalu tiang penyangga hanya menggunakan bamboo dan kayu yang disusun secara sederhana serta beralaskan semen. Tempat pembuangan limbah kulit kerang yang masih terletak di tengah-tengah permukiman masyarakat dan pada saat musim hujan, kulit kerang mengantongi

air dan membuat bau yang tidak sedap yang mengganggu masyarakat serta mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa Banjar Kemuning untuk membangun atau memiliki tempat khusus untuk pembuangan limbah kerang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran pemerintah desa dalam pemberdayaan nelayan wilayah pesisir di Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah ikut serta dalam pemberdayaan nelayan. Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah desa dalam melakukan perbaikan di berbagai aspek.

Aspek perbaikan kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Desa Banjar Kemuning yaitu membangun kembali KUB yang sebelumnya tidak beroperasi, mengembangkan jejaring kemitraan usaha. Aspek perbaikan usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Banjar Kemuning yakni membentuk unit usaha baru di KUB yaitu budidaya ikan udang Vannamei. Pemerintah Desa Banjar Kemuning masih belum bisa membantu meningkatkan perbaikan pendapatan nelayan melalui KUB. Pemberdayaan nelayan yang dilakukan

Pemerintah Desa Banjar Kemuning hanya sebatas membantu untuk menjadi jembatan agar nelayan mendapat bantuan dan pinjaman modal. Pemerintah Desa Banjar Kemuning belum maksimal dalam perbaikan lingkungan fisik karena pembangunan fasilitas bagi para nelayan seperti pembuangan limbah kulit kerang dan tempat pengupasan kerang belum diperbaiki secara layak dan memadai. Namun dalam untuk fasilitas kesehatan Pemerintah Desa Banjar Kemuning telah melakukan perbaikan dengan memanfaatkan lahan desa yang kosong menjadi Rumah Desa Sehat bagi nelayan.

Upaya-upaya yang dilakuka pemerintah desa dalam pemberdayaan nelayan sudah sesuai dengan empat konsep perbaikan. Namun, ada beberapa upaya perbaikan yang masih belum maksimal seperti perbaikan lingkungan fisik dan perbaikan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Nevi Puspita, Wartoyo, dan Yudi Prasetyo. 2018. 11 Analytical Biochemistry "Peran Kebudayaan Tari Banjarkemuning Dalam Melestarikan Kearifan Sejarah Lokal Di Kabupaten Sidoarjo 1999 – 2018." Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo Abstrak.

- Anwar, Zakariya, dan Wahyuni. 2019. "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia." *Sosioreligius* 1(4).
- Chalid, Nursiah, dan Yusbar Yusuf. 2014. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi* 22(2).
- Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. 2021. "KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN USAHA DEMI MEMANFAATKAN POTENSI YANG ADA DI DESA BANJAR KEMUNING, SEDATI." <https://fpk.unair.ac.id/pengmas-desabanjar-kemuning-sedati/>.
- Indriawati, Katherin et al. 2020. "Penyuluhan Pembuatan, Penggunaan, dan Perawatan Alat Ukur Kualitas Air Tambah untuk Meningkatkan Produksi Bandeng, di Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo." *Sewagati* 4(1): 26.
- JawaPos.com. 2020. "Bamsuet: Ironis, Tingkat Kesejahteraan Nelayan Memprihatinkan." <https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/08/2020/bamsuet-ironis-tingkat-kesejahteraan-nelayan-memprihatinkan/>.
- Kompas.com. 2022. "Kompas.com. (2022). Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim? [https://money.kompas.com/read/2022/01/18/220000126/mengapa-indonesia-disebut-negara-maritim?page=all](https://money.kompas.com/read/2022/01/18/220000126/mengapa-indonesia_disebut-negara-maritim?page=all#:~:text=Indonesia disebut negara maritim karena,(terpanjang kedua setelah Kanada).).
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru. 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 4(48): 1–9.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *PT Rineka Citra Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 2*.
- NU Online. 2018. "KKN Unusia Gelar Pelatihan Pengolahan Kerang."
- Saputra, Eka, dan Pulung Siswantara. 2020. "Penerapan Sistem Sanitasi Kekeurangan Pada Kelompok Usaha Bersama (Kub) Nelayan Kerang Di Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 4(1): 31–35.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surabaya.Bisnis.com. 2021. "Kinerja Merosot 70 Persen, Nelayan Pengusaha Perikanan Jatim Minta Relaksasi Kebijakan." *Surabaya.Bisnis.com*.

The Conversation. 2020. "Nelayan memang miskin, tapi riset buktikan mereka tetap bahagia." <https://theconversation.com/nelayan-memang-miskin-tapi-riset-buktikan-mereka-tetap-bahagia-136496>.

Totok Mardikanto, 1947-. 2014. *CSR Corporate Social Responsibility tanggung jawab sosial korporasi / Totok Mardikanto*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Triyanti, Riesti, dan Maulana Firdaus. 2016.

."Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil Dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 11(1): 29.

Wafi, Hanif, Yonvitner Yonvitner, dan Gatot Yulianto. 2019. "Fishermen Income and Welfare from the Profit Sharing

System in the Sunda Strait." *Journal of Tropical Fisheries Management* 3(2).

WRI-Indonesia.org. 2020. "4 Cara Membangun Laut Indonesia yang Lebih Tangguh Pascapandemi." *WRI-Indonesia.org*.

PROFIL SINGKAT

Penulis lahir di Sidoarjo, 31 Januari 2000. Hingga saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu penulis juga aktif menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Departemen Sosial Masyarakat pada periode 2018-2019, yang selanjutnya menjadi Wakil Ketua Himpunan Administrasi Publik pada periode 2019-2020.